

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA MODAL, DAN
PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH TERHADAP
FENOMENA *FLYPAPER EFFECT***

INES PRILIATAMI

8335128418



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI PAJAK
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

EFFECT OF PERSONNEL EXPENDITURE, CAPITAL EXPENDITURE, AND LOCAL GOVERNMENT DEBT PAYMENTS ON THE PHENOMENON OF FLYPAPER EFFECT

INES PRILIATAMI

8335128418



Skripsi is written as Part of Bachelor Degree in Economic Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
CONCENTRATION IN TAX
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ines Priliatami, 2017: Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Pembayaran Utang Daerah terhadap Fenomena *Flypaper Effect*. Dosen Pembimbing (1) Ratna Anggraini, S.E., Akt., M.Si. dan (2) Indra Pahala, S.E., M.Si. Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja modal, dan pembayaran utang daerah terhadap fenomena *flypaper effect* pada kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Populasi dari penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 19.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap terjadinya *flypaper effect*, (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap *flypaper effect*, dan (3) pembayaran utang daerah tidak berpengaruh terhadap *flypaper effect* pada Sulawesi Selatan tahun 2010-2013.

Kata Kunci: *Flypaper Effect*, Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Pembayaran Utang Daerah.

ABSTRACT

Ines Priliatami, 2017: The Effect Of Personnel Expenditure, Capital Expenditure, And Local Government Debt Payments On The Phenomenon Of Flypaper Effect. Supervisor (1) Ratna Anggraini, S.E., Akt., M.Si. dan (2) Indra Pahala, S.E., M.Si. Universitas Negeri Jakarta.

This study aimed to examined The Effect Of Personnel Expenditure, Capital Expenditure, And Local Government Debt Payments On The Phenomenon Of Flypaper Effet on countries and city in South Sulawesi. The population of this research is countries and cities in South Sulawesi in 2010 to 2013. The study used data from secondary in the form of the report realization of the budget by Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). This study uses logistic regression analysis for test the hypothesis with the help of SPSS 19.

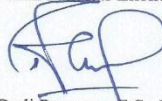
The research shows that (1) of personnel expenditure had no effect on the flypaper effect, (2) capital expenditure has significant positive to flypaper effect, and (3) And Local Government Debt Payments not affect the flypaper effect in South Sulawesi this year 2010-2013.

Keyword: Flypaper Effect, Personnel Expenditure, Capital Expenditure, And Local Government Debt Payments.

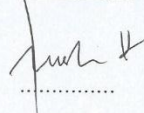
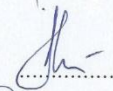
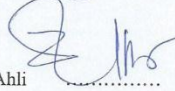
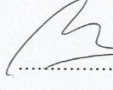
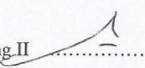
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Tanggal</u>
<u>Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		31 Januari 2017
<u>Tri Hesti Utaminingsy, S.E., M.SA</u> NIP. 19760107 200112 2 001	Sekretaris		31 Januari 2017
<u>Dr. ETTY Gurendrawati, S.E., Akt., M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Penguji Ahli		31 Januari 2017
<u>Ratna Anugeraini, S.E., Akt., M.Si</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Pembimbing I		31 Januari 2017
<u>Indra Pahala, S.E., M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Pembimbing II		7 Februari 2017

Tanggal Lulus: 30 Januari 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya mengajukan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan



No Reg: 8335128418

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Pembayaran Utang Pemerintah terhadap Fenomena *Flypaper Effect*”** .

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari pihak yang turut mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu dan Ayah yang selalu menjadi alasan pertama untuk tetap semangat dan motivasi untuk cepat lulus. Terima kasih karena selalu mendukung secara moril maupun materi dalam kondisi apapun. Dan untuk adik-adik SPESIAL saya, Lia, Sultan dan Haslah dengan selalu bisa memberi hiburan ketika lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Thanks untuk keluarga tercintaku!;
2. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;

3. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Ibu Ratna Anggraini, SE., Akt., M.Si.,CA dan Bapak Indra Pahala, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Akuntansi UNJ yang telah memberikan wawasan terbaik dan bermanfaat bagi Penulis;
6. Teman-teman S1 Akuntansi Non Reguler A 2012. Terima kasih telah menjadi teman kelas yang kompak dan seru selama 4 tahun ini. Dan juga teman-teman Reg B, Reg A dan Non Reg B 2012.
7. Mama Nena, Nena, Amih Nena, Verra, Haryo, Nandy, Gusti, Deni, MG dan Irsan sudah mau menerima keluh kesah dan memberi support saya yang luar biasa selama proses skripsi saya.
8. Sahabat-sahabat TRIO KWEK-KWEK. Yuli yang selalu memacu saya untuk cepat selesain skripsi, Icol yang selalu memperhatikan saya dalam menyelesaikan skripsi;
9. Sahabat- sahabat temen sd. Brenda, Upil, Sarah, Eva dan Ardi yang selalu mendukung dan memberikan canda tawa disela-sela penulisan skripsi ini; Sahabat- sahabat temen rumah . Tika dan Ema makasih atas segala motivasi dan setia sebagai pelampiasan curhat tentang carut marutnya dunia perskripsian.;

10. Terimakasih untuk B 1 KEN, Dian, Kiky, Samya, Winda, Tari, dan Lia yang telah merekrut saya di kelompok ini. Terimakasih atas keramahan, kesabaran, kelakuan heboh kalian yang selalu membuat hidup di perkuliahan saya dari upnormal menjadi lebih normal dan dari flat jadi berwarna.;
11. Teman-teman HMJ Akuntansi. Khususnya, Budi, Azis, Ipeh, Nena, Tiwi, Ka Asni, Ka Rani, Ka Ayu dan Seluruh HMJ Akuntansi 2012-2013 pokoknya terimakasih atas pengalaman yang diberikan dalam berorganisasi;
12. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyaknya kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maka, Penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan dampak yang positif.

Jakarta, 7 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual	12
1. Fenomena <i>Flypaper Effect</i>	12
2. Belanja Daerah	14
2.1. Belanja Pegawai	17
2.2. Belanja Modal	18
3. Pembayaran Hutang Daerah	20
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
5. Dana Alokasi Umum (DAU)	29
6. Teori Keagenan	31
B. Hasil Penelitian Relevan	33
C. Kerangka Teoritik	35
D. Perumusan Hipotesis	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	42
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	42
C. Metode Penelitian	42
D. Populasi dan Sampling	43
E. Operasional Variabel	44
1. Fenomena <i>Flypaper Effect</i>	44

2. Variabel Independen	45
F. Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	50
1. Hasil Pemilihan Sampel	50
B. Pengujian Hipotesis	52
C. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	69
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I.	Data Keseluruhan Penelitian	76
II.	Data Penelitian <i>Flypaper Effect</i>	79

DAFTAR TABEL

Tabel

II.1. Hasil Penelitian yang Relevan	34
III.1. Daftar Sampel Penelitian	43
IV.1. Hasil Pemilihan Sampel	51
IV.2. Statistik Deskriptif	52
IV.3. Persamaan Variabel Uji Logit	56
IV.4. Hasil Uji Model Fit 1 (<i>Block Number=0</i>)	58
IV.5. Hasil Uji Model Fit 2 (<i>Block Number=1</i>)	58
IV.6. <i>Omnibus Tests of Model Coefficients</i>	59
IV.7. <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	60
IV.8. Hasil Uji <i>Wald</i>	61
IV.9. Hasil Pengujian Koefesien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1. Kerangka Pemikiran	38
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan di setiap daerah di Indonesia harus menerapkan desentralisasi atau pemerintah daerah lebih berwenang besar dalam mengelola dan mengatur sendiri urusan daerah otonom tersebut. Tapi tak jarang pemerintah daerah tidak memaksimalkan penerapan kebijakan otonomi daerah ini dengan sebaik-baiknya. Tujuan otonomi daerah adalah agar terwujudnya kemandirian daerah juga faktanya masih belum dapat di capai oleh aparatur pemerintah daerah terhadap daerahnya tersebut.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang lebih sempit disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai salah satu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Yani,2008:1). Tidak jarang topik ini muncul ke permukaan yang merupakan salah satu pemicu perpecahan bangsa. Persoalannya mudah ditebak, yaitu adanya daerah yang kurang puas dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat. Terkait hubungan tersebut, adanya masalah kebijakan keuangan yang tersentralisasi pada masa orde baru telah menciptakan perbedaan yang signifikan terhadap pemerimaan yang besar antara pusat dan daerah. Dimana daerah yang memiliki sumber pendapatan keuangan yang besar tidak dapat mengelola sumber keuangannya secara mandiri dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana dari pusat untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan

pembangunan di wilayahnya (Chalid,2005:8). Desentralisasi keuangan tidak lain pada prinsipnya dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendapatan asli daerahnya.

Jika dilihat dari APBD setiap pemerintah daerah, dana perimbangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap total pendapatan dibanding PAD. Kebijakan pendanaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) diberikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Namun, pengalokasian Dana Alokasi Umum di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja namun kurang memperhatikan kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah (Oktavia,2014). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Peruntukan DAU sebenarnya untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah, bukan untuk membiayai belanja pemerintah (Chalid,2008:17). Namun, terdapat kesalahpahaman persepsi tentang peruntukan DAU yang digunakan untuk menutupi anggaran belanja pemerintah.

Masalah yang sering terjadi dimana keadaan pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana perimbangan atau dana transfer daripada menggunakan kemampuan pendapatan daerah sendiri yang dikenal dengan istilah *flypaper effect*. Pemerintah juga lebih sering memanfaatkan

DAU yang merupakan bagian dari salah satu dana perimbangan untuk membiayai belanja daerahnya. Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja bunga, pegawai, bantuan sosial, subsidi, hibah bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan, Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal.

Belanja pegawai semakin mendominasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Indonesia. APBD seharusnya untuk kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Dominasi belanja pegawai di APBD pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non pegawai (belanja modal, barang dan jasa) yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), rata-rata belanja pegawai sebesar 42% dari APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun anggaran 2012. Sedangkan porsi belanja barang dan jasa sebesar 20%, serta belanja modal 22%. Sehingga, APBD setiap daerah cenderung banyak dikuasai untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja infrastruktur. Apalagi, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan porsi belanja modal dalam APBD sebesar 29% pada 2013 dan 30% pada 2014. Maka, perlu adanya pengendalian belanja pemerintah daerah dalam porsi untuk belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa (wartaekonomi.co.id).

Dari hasil perhitungan, realisasi porsi APBD untuk belanja pegawai pada 50 daerah berkisar 65% hingga 75%. Rata-rata realisasi belanja pegawai daerah masih didominasi wilayah Jawa. Disusul wilayah Sumatera. Rata-rata realisasi porsi APBD untuk belanja pegawai tertinggi terjadi pada Kabupaten Klaten hingga mencapai 74%. Dengan realisasi porsi APBD untuk belanja pegawai daerah yang begitu besar melebihi 50%, kondisi ini menjadi perhatian karena secara implisit, daerah-daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD untuk diluar belanja pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah diluar belanja pegawai, khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan dalam mendukung pemenuhan pelayanan publik.

Menurut hasil penelitian Fattah & Irman (2012) kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan yang diukur dari seberapa jauh kemampuan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dalam membiayai belanja daerah bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil, maka apabila dilihat prosentase rata-rata perbandingan PAD terhadap Total Belanja daerah yang sebesar 7,32% dan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung daerah yang sebesar 15,71%, dan juga prosentase rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) untuk daerah terhadap Total Belanja Daerah yang sebesar 16,56% dan PAD+BHPBP terhadap Belanja Tidak Langsung yang sebesar 35,39% maka dapat dikatakan bahwa Kesiapan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dibidang keuangan dalam pembiayaan belanja daerahnya masih sangat kurang.

Hal menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 64,61% sampai 92,68%.

Dari data hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan tahun 2013 adalah Secara agregat PAD hanya mencapai 19,52% dari dana transfer. Untuk Pemprov Sulsel PAD nya mencapai 98,44% dari dana transfer, secara relatif mulai menunjukkan kemandirian dalam membiayai diri sendiri. Pemerintah Kota Makassar 32,29% merupakan persentase PAD terbesar kedua namun hal ini belum menunjukkan kemandirian yang cukup. Pemerintah Kota Parepare PADnya 11,17%, Pemda Palopo 7,54% dan Pemerintah daerah Bone 5,67% dan juga 19 pemda lainnya yang persentase PADnya dibandingkan dana transfer ke masing-masing daerah relatif kecil, menunjukkan masih belum mandiri dalam usaha membiayai daerahnya masing-masing. Realisasi anggaran semester I tahun 2013 berdasarkan empat jenis belanja, secara agregat mencapai 36,22% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai 50,22%, belanja bantuan sosial 48,80%, belanja barang 34,64% dan belanja modal 22,58%. Realisasi semester I tahun 2013 meningkat dibanding semester I tahun 2012 33,71%. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja modal dari 16,27% di tahun 2012 menjadi 22,58%. Namun belanja bantuan sosial realisasinya menurun dari 51,87% pada 2012 menjadi 48,80%. Pada Realisasi pembayaran hutang dari tahun 2012 sampe 2013 juga meningkat 0,02 % setiap tahunnya dari 1.868.688.777.991 menjadi 1.874.055.580.997 .

Maka permasalahannya diperkirakan semakin besarnya jumlah biaya pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan PAD yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah. Jika pihak penyusun anggaran memaksimalkan anggaran belanja pegawai, tentunya akan terjadi pemborosan dalam penggunaan DAU dan belanja pegawai ini menyerap dana transfer yang lebih mempengaruhi terjadinya fenomena *flypaper effect*

Selain belanja pegawai, belanja modal juga merupakan pengeluaran terbesar ketiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika pihak eksekutif dan legislatif berusaha untuk memaksimalkan penganggaran belanja modal tentunya akan menyerap dana transfer yang lebih yang diduga menyebabkan terjadi *flypaper effect*.

Selain penerimaan dari pemerintah pusat yang berbentuk dana perimbangan, pemerintah daerah juga melakukan pinjaman kepada pihak luar dalam bentuk utang. Besarnya jumlah hutang di Provinsi ini yang tidak stabil dari tahun 2013 berdampak pada pengeluaran pembayaran pokok hutang pemerintah daerah. Adanya hal signifikan ini maka pembayaran pokok utang diduga menjadi salah satu penyebab fenomena *flypaper effect* di pemerintah daerah.

Flypaper effect dapat memberikan implikasi bahwa dalam penyusunan APBD perilaku eksekutif dan legislatif berperan penting dalam memutuskan persetujuan anggaran. Daerah juga didorong untuk terus meningkatkan PAD, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kesit 2004,

Studi Aaberge & Langorgen (1997) menganalisis perilaku fiskal dan Belanja Pemda dengan *simultaneous setting* dan menemukan adanya *flypaper-effect* dalam respon daerah terhadap perubahan pendapatan. Oleh karena itu, masalah Pemda dalam pembuatan keputusan alokasi sumberdaya adalah pemilihan kombinasi terbaik antara pajak daerah, surplus dan defisit anggaran, dan output dalam pelayanan publik, yang dibatasi oleh “aturan” bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grants* dari Pemerintah Pusat, plus pajak daerah. Implikasi perilaku Pemerintah daerah juga cenderung melakukan yang tidak biasanya seperti memanipulasi pengeluaran belanja daerah daripada mengoptimalkan pengumpulan PAD itu sendiri.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan fenomena *flypaper effect* ini. Dalam penelitian Fitri (2014) menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya *flypaper effect*, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap *flypaper effect*. Penelitian tentang penyebab terjadinya *flypaper effect* sudah beberapa yang melakukan. Berdasarkan penelitian Burhanuddin (2012) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran hutang pemerintah daerah terhadap fenomena *flypaper effect* yang melakukan penelitian di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*, investasi pemerintah dan pembayaran hutang pemerintah tidak berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*. Hidayat (2013) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran hutang

pemerintah terhadap fenomena *flypaper effect* di Provinsi D.I.Y dan Jawa Tengah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja pegawai mempengaruhi fenomena ini. Sedangkan investasi pemerintah dan pembayaran utang tidak mempengaruhi *flypaper effect*. Rina Anita (2013) menjelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sampel yang terlalu kecil sehingga tidak memperlihatkan faktor – faktor penyebab terjadinya *flypaper effect*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan hasil dan objek penelitian terdahulu antara pengaruh – pengaruh apa saja yang digunakan terhadap fenomena *flypaper effect*. Peneliti ingin melakukan penelitian ini karena masih sedikit yang membahas penggunaan variabel ini khususnya di Indonesia.

Berdasarkan *research gap* diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Pembayaran Utang Daerah terhadap fenomena *flypaper effect* di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2013**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi fenomena *flypaper effect* adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian transfer di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja namun kurang memperhatikan kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah.
2. Dominasi belanja pegawai di APBD pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non pegawai (belanja modal, barang dan jasa) yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.
3. Lebih mengandalkan belanja modal dalam pengeluaran belanja daerah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Besarnya jumlah pembayaran pokok hutang pemerintah daerah yang tidak stabil.
5. Pemda yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumberdaya adalah pemilihan kombinasi terbaik antara pajak daerah, surplus dan defisit anggaran, dan output dalam pelayanan publik, yang dibatasi oleh aturan bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grants* dari Pempus, plus pajak daerah.
6. Perilaku Pemerintah daerah juga cenderung melakukan yang tidak biasanya seperti memanipulasi pengeluaran belanja daerah daripada mengoptimalkan pengumpulan PAD itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam

penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian yang diteliti adalah pemerintah kota / kabupaten di Sulawesi Selatan.
2. Sampel yang diteliti yaitu Laporan realisasi Anggaran pemerintah kota / kabupaten di Sulawesi Selatan dengan rentang waktu dari tahun 2010-2013.
3. Determinan yang digunakan sebagai pengaruh terhadap fenomena *Flypaper Effect* adalah belanja pegawai, belanja modal, pembayaran hutang daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2013?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2013?
3. Apakah Pembayaran Utang Daerah berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2013?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah sumber informasi mengenai pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Pembayaran Utang Daerah terhadap

fenomena flypaper effect di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dapat mengetahui wawasan tentang keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penyempurnaan dalam kepegawaian dan belanja modal agar otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Fenomena *Flypaper Effect*

Fenomena *Flypaper Effect*, istilah ini diperkenalkan oleh pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) bahwa pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk menghindari pemotongan pajak ketika pemerintah daerah menerima pendapatan dari hibah daripada mereka melakukan untuk menaikkan pajak daerahnya. Fenomena *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari *transfer/grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah (Ida, 2015). *Unconditional grants* yang diprosikan dengan dana alokasi umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) (Qalila, 2013)

Menurut Daugan dan Kenyon (dalam Ndadari, 2008) menyatakan bahwa: “*Flypaper Effect* merupakan suatu keganjilan dalam hal ini kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh masyarakat”.

Pramuka (2010) menjelaskan *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah.

Menurut Maimunah (2006), *Flypaper Effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, yang di proksikan dengan PAD. Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa Fenomena *flypaper effect* adalah kondisi dimana pemerintah daerah lebih bergantung pada dana transferan dari pusat daripada pendapatan daerahnya sendiri dalam belanja daerah.

Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah *flypaper effect*, yakni Model Birokratik (*bureaucratic model*) dan Model Ilusi Fiskal (*fiscal illusion model*) (Pramuka,2010). Model Birokratik merupakan cara pandang bahwa posisi birokratik lebih berperan penting dalam pengambilan keputusan publik untuk memaksimalkan anggaran dan mengendalikan dana. Model ini juga menegaskan *flypaper effect* merupakan akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak (Pramuka, 2010). Sedangkan menurut Endah (2015) bahwa Model ilusi fiskal ini terjadi saat pembuat keputusan memiliki

kewenangan untuk membuat ilusi dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat merubah perilaku keuangan tersebut dan respon yang berbeda terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat dari tujuan utamanya.

Variabel ini diukur dengan melihat pengaruh jumlah PAD dengan dana transfer pusat pada alokasi belanja daerah melalui analisis regresi menggunakan kriteria kategori dimana, kriteria nilai 0, untuk pengaruh $PAD > DAU$ terhadap Belanja Daerah (tidak terjadi *flypaper effect*) dan kriteria nilai 1, untuk pengaruh $PAD < DAU$ terhadap Belanja Daerah (terjadi *flypaper effect*).

2. Belanja Daerah

Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja dapat diklasifikasikan ke dalam masing- masing jenis belanja terdiri atas:

- a. Belanja Operasi. Belanja operasi adalah biaya yang masa manfaat pengeluaran biaya tersebut kurang dari satu tahun anggaran. Belanja

operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- b. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- c. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 memberikan definisi belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengelompokan belanja menurut Permendagri No. 21 tahun 2011 ini terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini meliputi :Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belanja ini merupakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang dan jasa tersebut berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa, rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan

barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

- 3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

2. Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Menurut Rina, Dwi dan Hermawan (2014), pengukuran belanja pegawai menggunakan persentase belanja pegawai yaitu belanja pegawai dibagi dengan belanja daerah setiap tahunnya dengan satuan nominal hitung. Fungsi dari belanja pegawai untuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintah daerah (Qalila,2013).

Alokasi belanja pegawai dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi belanja pegawai} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{belanja daerah}} \times 100\%$$

3. Belanja Modal

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

- 1) Belanja modal tanah
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- 5) Belanja modal fisik hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006).

Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja

Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal.

Dari pengertian – pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Pengukuran Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan jumlah Belanja Modal yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran BPK RI.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{belanja daerah}} \times 100 \%$$

3. Pembayaran Hutang Daerah

Pembayaran utang merupakan pembayaran yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran utang ini masuk dalam pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD. Variabel ini diukur dengan satuan hitung rupiah berdasarkan jumlah pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok

utang yang didapat pada laporan Realisasi APBD pada setiap tahunnya selama 3 tahun, yang nantinya dirata-rata dan kemudian di*Lag*-kan.

Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 sebagai berikut :

“Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya “.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut :

“Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran”.

Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan / atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran

kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- d. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah,

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a) Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

b) Persyaratan Pinjaman

Menurut Ahmad Yani (2008: 286), Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - BW}{2,5 \text{ Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{ Bunga} + \text{ Biaya Lain}} \geq$$

3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

4. Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman

Menurut Ahmad Yani (2008;282),Jenis Pinjaman daerah terdiri dari:

1. Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Pinjaman jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, semakin baik pemerintah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin baik pula daerah itu sendiri untuk memberikan pelayanan yang baik untuk kebutuhan daerah itu sendiri.

UU No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah atau disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang digunakan untuk kebutuhan daerah atau belanja daerah tersebut.

Menurut Yani (2008;51) Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari;

- a. Pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain; jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini

mencakup; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang selain dari pajak daerah, Retribusi daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain adalah; Jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, dan fasilitas sosial maupun umum.

5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

UU No. 33 Pasal 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

APBD Kabupaten/Kota oleh pemerintah yang diatur berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah

akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini bertujuan untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

Penetapan jumlah DAU pada Kabupaten/Kota telah diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005 pasal 37 yang berbunyi:

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- b. Proporsi DAU antara provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- d. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

6. Teori Keagenan

Hubungan Belanja Pegawai, Belanja Modal, Pembayaran Hutang Daerah terhadap fenomena *Flypaper Effect* dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Teori keagenan yakni masalah terkait hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2000) menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya.

Menurut Arifah (2012) teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :

- a. Asumsi tentang sifat manusia merupakan penekanan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*);
- b. Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) antara prinsipal dan agen;
- c. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/ dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2002:82; Petrie, 2002). Mardiasmo (2007: 20-21) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (a) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul/Tahun	Variabel Dalam Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>PENGARUH BELANJA PEGAWAI, INVESTASI PEMERINTAH, DAN PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FENOMENA <i>FLYPAPER EFFECT</i></p> <p>(Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2007 – 2011)</p> <p>Rina Anita, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati</p> <p>E-Jurnal Universitas Bung Hatta Vol.4 No.1 2014</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. <i>Flypaper effect</i></p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Belanja Pegawai, 2. Investasi 3. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah.</p>	<p>hasil analisis adalah belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap fenomena <i>flypaper effect</i> pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.</p>

2.	<p>PENGARUH BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA MODAL TERHADAP <i>FLYPAPER EFFECT</i></p> <p><i>(Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera 2008-2012)</i></p> <p>DIANA FITRI (2014)</p> <p>E-Jurnal Universitas Negeri Padang Vol.2 No.3</p>	<p>Variabel Dependend:</p> <p>1. <i>Flypaper effect</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>1. Belanja Pegawai 2. Belanja Modal</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa</p> <p>(1) belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya <i>flypaper effect</i>, dan</p> <p>(2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap <i>flypaper effect</i>.</p>
3	<p>Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah Dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect</p> <p>Ahmad Burhanuddin</p> <p>Accounting Analysis Journal Vol.1 No.1 (2012)</p>	<p>Variabel Dependend:</p> <p>1. <i>Flypaper effect</i></p> <p>Variabel independen:</p> <p>1. Belanja Pegawai, 2. Investasi Pemerintah, Dan 3. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>flypaper effect</i>. Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>flypaper effect</i>.</p>
4.	<p>A Predictive Index for the Flypaper Effect</p> <p>Koleman, S. Strumpf. 1996.</p> <p>Journal of Public Economics</p> <p>Volume 69, Issue 3</p>	<p>Variabel dependen:</p> <p>1. <i>Flypaper effect</i></p> <p>Variabel independen:</p> <p>1. voter control of social decisions 2. partial politician control 3. fiscal illusion/politician control</p>	<p>Ketiga variabel independen tersebut mendukung terjadinya Flypaper effect</p>
5.	<p><i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia</p> <p>Endah Purbarini, Gregorius N. Masdjojo</p> <p>Jurnal Ekonomi Pembangunan,</p>	<p>Variabel dependen:</p> <p>1. belanja operasi 2. Belanja modal</p> <p>Variable independen:</p> <p>1. PAD</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi. Selanjutnya ditemukan pula terjadi flypaper effect pada Belanja Operasi. DAU berpengaruh tidak</p>

	Vol.16 No.1, Juni 2015	2. DAU	signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Modal.
--	------------------------	--------	---

Tabel II.1

Hasil Penelitian yang Relevan

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2016

C. Kerangka Teoritik

1. Hubungan Belanja Pegawai terhadap Fenomena *Flypaper Effect*

Belanja yang dilakukan oleh setiap propinsi di Indonesia ini jumlah yang dikeluarkannya ini berbeda - beda, ini dikarenakan kebutuhan akan pelayan publik kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat di masing - masing daerah pun berbeda - beda. Dalam melakukan belanja daerah ini, pemerintah daerah membutuhkan sejumlah dana untuk merealisasikan pelayanan publik yang telah dianggarkan. Pada dasarnya ada 2 sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah ini yaitu sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah dan Dana Perimbangan. Dana perimbangan antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Mahmudi,2010: 27). Berhubung dengan penelitian masalah ini adalah fenomena *flypaper effect* maka disini berfokus pada Dana Alokasi Umum (DAU). DAU di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing daerah dan jumlahnya telah ditetapkan dan telah dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota oleh pemerintah yang diatur berdasarkan PP No. 55

Tahun 2005. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini bertujuan untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah (Endah,2015).

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) (Yani,2008:142). Formula celah fiskal dan penambahan DAU yang ditegaskan kembali berdasarkan Perubahan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yakni: alokasi bagi daerah yang potensi fiskal besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh DAU relatif kecil. Sebaliknya, bagi daerah yang potensi fiskal kecil, tetapi kebutuhan fiskal besar maka akan memperoleh DAU relatif besar. Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia dan indeks produk domestik regional bruto per kapita (Yani, 2008:146). Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah dan Dana bagi hasil.

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja daerah, yang pengalokasian anggarannya terbesar. Hal itu menyebabkan pemerintah lebih memerlukan dana yang lebih banyak lagi dan lebih sering mengandalkan Dana Perimbangan karena Pendapatan Daerah yang masih kecil. Dan kondisi tersebut adalah *flypaper effect*. Seperti penelitian yang dilakukan Burhanuddin (2012) tentang pengaruh belanja pegawai terhadap fenomena *flypaper effect*, menunjukkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*.

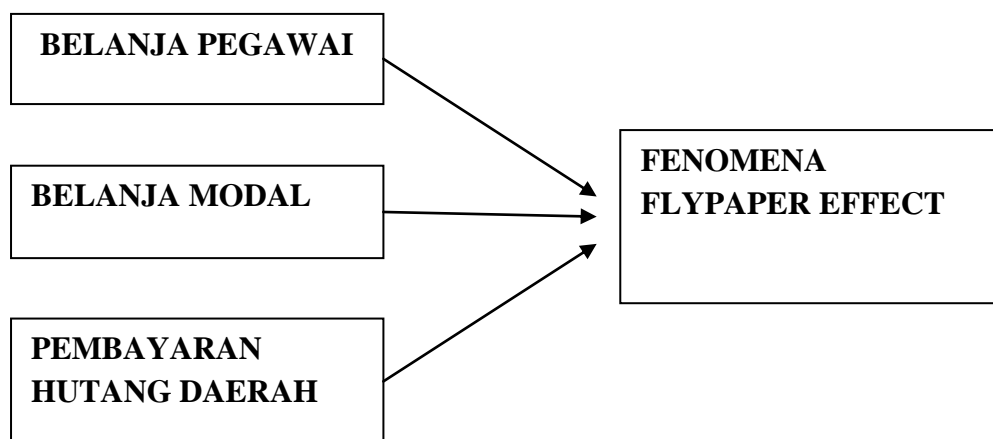
2. Hubungan Belanja Modal terhadap Fenomena *Flypaper Effect*

Seperti Belanja pegawai, belanja modal juga bagian belanja daerah. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) dalam Harianto Adi (2007) bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memeberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Dan penganggaran belanja modal dimaksimalkan oleh pihak penyusunan anggaran tanpa tidak dapat menstimulasi investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, tentunya juga akan terjadi pemborosan dalam penggunaan dana yang akan menyebabkan terjadi *flypaper effect* (Fitri,2004). Jadi dapat dikatakan belanja modal mempengaruhi fenomena *flypaper effect*.

3. Hubungan Pembayaran Hutang Daerah terhadap Fenomena *Flypaper Effect*

Besarnya jumlah hutang ini berimbang pada pengeluaran pembayaran pokok hutang pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah ada hubungan secara tidak langsung terhadap penyerapan dan transfer dari pemerintah pusat, karena Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan tentang pembayaran kembali pinjaman diantaranya berbunyi: “Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran seperti berikut :



Sumber : Data diolah oleh Penulis 2016

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh belanja pegawai terhadap Fenomena *flypaper effect*

Belanja pegawai dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/201 adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Belanja pegawai dipergunakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintah daerah. Besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Burhanuddin (2012) tentang pengaruh belanja pegawai terhadap fenomena *flypaper effect*, menunjukkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*. Hal ini menandakan bahwa tingginya anggaran belanja pegawai mempengaruhi terjadinya *flypaper effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013), juga menunjukkan hasil yang sama. Daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai yang dimaksimalkan oleh para penyusun anggaran dapat dikatakan mempengaruhi terjadi fenomena *flypaper effect*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*.

2. Pengaruh Belanja Modal dengan Fenomena *Flypaper Effect*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2004).

Sama halnya dengan belanja pegawai, jika penganggaran belanja modal dimaksimalkan oleh pihak penyusunan anggaran, tentunya juga akan terjadi pemborosan dalam penggunaan dana yang akan menyebabkan terjadi *flypaper effect* (fitri, 2004). Jadi dapat dikatakan belanja modal mempengaruhi fenomena *flypaper effect*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Belanja modal berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*.

3. Pengaruh Pembayaran Utang Daerah dengan Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999, hutang pemerintah daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membayar kembali jumlah uang dalam jangka waktu tertentu kepada pihak *lender*.

Adanya ketidakstabilan pada pengurangan jumlah hutang yang sangat signifikan maka pembayaran pokok utang diduga menjadi salah satu penyebab fenomena flypaper effect di pemerintah daerah (Burhannudin, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pembayaran Utang Daerah berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritik, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan hubungan antara belanja pegawai dengan fenomena *flypaper effect*;
2. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan hubungan antara belanja dengan fenomena *flypaper effect*;
3. Memberikan fakta dan bukti empiris baru terkait dengan hubungan antara pembayaran hutang daerah dengan fenomena *flypaper effect*.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Obyek penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten dan kota. Ruang Lingkup penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah tahun 2010-2014.

C. Metode Penelitian

Pengujian hipotesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi model LOGIT atau *Logistic Regression* melalui program SPSS 18 yang dilakukan secara serentak terhadap ketiga variabel independen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder

yang diperoleh melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yaitu Laporan Realisasi Anggaran.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2013.

2. Sampel

Menurut Menurut Sugiyono (2012:62) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi dijadikan sampel.

Tabel III.1

Daftar Sampel Penelitian

No	Kota/Kabupaten	No	Kota/Kabupaten
1	Kabupaten BANTEANG	12	Kabupaten BONE
2	Kabupaten BARRU	13	Kabupaten BALUKUMBA
3	Kabupaten JENEPO	14	Kabupaten ENREKANG
4	Kabupaten KEP. SELAYAR	15	KABUPATEN GOWA
5	Kapupaten LUWU	16	KABUPATEN MAROS
6	Kapupaten LUWU UTARA	17	KABUPATEN PANGKEP
7	Kapupaten SINJAI	18	KABUPATEN PINRANG

8	Kapupaten Soppeng	19	Kabupaten Sidenreng Rappang
9	Kota MAKASSAR	20	KABUPATEN TANAH TORAJA
10	Kabupaten TAKALAR	21	KABUPATEN TANAH WAJO
11	Kota Pare Pare	22	Kabupaten Tanah Palopo

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah fenomena *flypaper effect*. sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja pegawai, belanja modal, dan hutang daerah.

1. Fenomena *flypaper effect*

a. Definisi Konseptual

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah (Ida, 2015).

b. Definisi Operasional

Variabel ini diukur dengan melihat pengaruh jumlah PAD dengan Dana Alokasi Umum pada alokasi belanja daerah melalui analisis regresi menggunakan kriteria kategori dimana, kriteria nilai 0, untuk pengaruh

PAD>DAU terhadap Belanja Daerah (tidak terjadi *flypaper effect*) dan kriteria nilai 1, untuk pengaruh PAD<DAU terhadap Belanja Daerah (terjadi *flypaper effect*).

2. Variabel independen

2.1 Belanja Pegawai

a. Definisi Konseptual

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Definisi Operasional

Menurut Rina, Dwi dan Hermawan (2014), pengukuran belanja pegawai menggunakan persentase belanja pegawai yaitu belanja pegawai dibagi dengan belanja daerah setiap tahunnya dengan satuan nominal hitung.

Alokasi belanja pegawai dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi belanja pegawai} = \frac{\text{Belanja pegawai}}{\text{Belanja daerah}} \times 100\%$$

2.2 Belanja Modal

a. Definisi Konseptual

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

b. Definisi Operasional

Pengukuran Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan jumlah Belanja Modal yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran BPK RI.

Alokasi belanja modal dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{belanja daerah}} \times 100 \%$$

2.3 Pembayaran Hutang Daerah

a. Definisi Konseptual

Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 adalah “Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang

akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

b. Definisi Operasional

. Variabel ini diukur dengan satuan hitung rupiah berdasarkan jumlah pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang yang didapat pada laporan Realisasi APBD kemudian di Log kan.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) setiap variabel (Ghozali, 2011:19).

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*) melalui program SPSS versi 19.0 yang dilakukan secara serentak terhadap ketiga variabel independen. Regresi *logistic* tidak perlu asumsi normalitas data pada *logistic* bebasnya (Ghozali 2011:333).

Model regresi *logistic* yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{FE}{1-FE} = \alpha + \beta_1 \times_1 + \beta_2 \times_2 + \beta_3 \times_3 + \epsilon$$

dimana :

$\text{Ln} \frac{FE}{1-FE} = \text{Flypaper Effect}$ (variable dummy dengan kategori 1 jika terjadi *flypaper effect* dan kategori 0 jika tidak terjadi *Flypaper Effect*)

β = Slope atau koefisien regresi

X_1 = Belanja Pegawai

X_2 = Belanja Modal

X_3 = Pembayaran Pokok Utang

ε = error

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi *logistic* tidak memerlukan uji asumsi klasik karena sebelum pengujian hipotesis dilakukan, langkah pertama adalah menilai kelayakan model regresi dan menilai model fit yang merupakan pengganti dari uji asumsi klasik.

a. Menilai Model Fit

Menilai model fit dilakukan untuk mengetahui model yang dihipotesiskan fit dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai $-2LL$ awal dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya. Adanya pengurangan nilai antara $-2LL$ awal dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi semakin baik. Hipotesis untuk menilai model fit adalah (Ghozali 2011:340)

b. Menilai Kelayakan Model Regresi

Menurut Yamin dan Kurniawan (2011:100) untuk Menguji kebaikan model dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-*

fit Test. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit Test statistic* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit Test statistic* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

c. Uji statistik Wald

Uji Wald merupakan pengujian yang sama dengan uji t, namun pengujian wald digunakan untuk regresi logistik. Uji Wald berfungsi untuk menguji apakah variabel yang dimasukkan dalam model signifikan memberikan kontribusi terhadap model (Yamin, dan Kurniawan, 2011: 106).

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke's R2*. Nilai *Nagelkerke's R2* dapat diinterpretasikan sama seperti nilai R^2 pada *multiple regression*. *Nagelkerke* adalah penyesuaian terhadap Cox Snell, hanya saja skala yang dihasilkan dipersempit menjadi seluruh nilai antara 0 dan 1 (Yamin dan Kurniawan, 2011:99).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi semua Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2010-2013. Pemilihan provinsi Sulawesi Selatan sebagai populasi penelitian ini adalah karena penelitian mengenai fenomena *Flypaper Effect* di Sulawesi Selatan masih jarang dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk memilih provinsi Sulawesi Selatan sebagai populasi penelitian. Sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 20 kabupaten dan 2 kota. Total seluruh sampel dalam penelitian ini adalah 88 kabupaten/kota untuk periode dari tahun 2010-2013. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu, antara lain:

.Kabupaten/Kota yang telah terdaftar pada provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2013;

- a. Laporan Realisasi Anggaran tahunan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk periode 2010-2013;

- b. Terdapat informasi yang diperlukan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk kebutuhan penelitian. Adapun data yang diperlukan adalah data mengenai belanja pegawai, belanja modal dan pembayaran hutang daerah.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 22 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan selama tahun pengamatan 2010-2014. Rincian pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1. Rincian pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hasil Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten/kota yang telah terdaftar di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2013	24
2	Laporan Realisasi Anggaran tahunan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk periode 2010-2013	(0)
3	Tidak terdapat informasi yang diperlukan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk kebutuhan penelitian.	(2)

Jumlah sampel	22
Jumlah Observasi (4 tahun)	88

Sumber : diolah penulis 2016

B. Pengujian Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai data penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

Tabel IV.2

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FE	88	,00	1,00	,6705	,47274
BP	88	46,1834177	76,1873383	59,119030977	5,5516881614
BM	88	8,2209249	31,3415237	20,032952659	4,5989466134
PUD	88	16,2269501	25,5255076	22,959369118	1,6577055769
Valid N (listwise)	88				

Sumber:SPSS 18 Data diolah peneliti 2016

a. Flypaper Effect

Flypaper Effect diukur dengan melihat pengaruh jumlah PAD dengan Dana Alokasi Umum pada alokasi belanja daerah melalui analisis regresi menggunakan kriteria kategori dimana, kriteria nilai 0, untuk pengaruh PAD>DAU terhadap Belanja Daerah (tidak terjadi flypaper effect) dan kriteria nilai 1, untuk pengaruh PAD<DAU terhadap Belanja Daerah (terjadi flypaper effect).

Dari hasil uji statistik deskriptif, pada tahun 2010 terdapat 4 kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terjadi *flypaper effect* dan. terdapat 18 kabupaten / kota yang terjadi *flypaper effect*. Pada tahun 2011 terdapat 5 kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terjadi *flypaper effect* dan. terdapat 17 kabupaten / kota yang terjadi *flypaper effect*. pada tahun 2012 terdapat 11 kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terjadi *flypaper effect* dan. terdapat 11 kabupaten / kota yang terjadi *flypaper effect*. pada tahun 2013 terdapat 8 kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terjadi *flypaper effect* dan. terdapat 14 kabupaten / kota yang terjadi *flypaper effect*. Nilai rata-rata (mean) dari Fenomena *flypaper effect* adalah sebesar 0,6705 dengan standar deviasi sebesar 0,47274. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa terdapat lebih banyak kabupaten yang mengalami *flypaper effect*.

b. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dihitung menggunakan persentase belanja pegawai yaitu belanja pegawai dibagi dengan belanja daerah setiap tahunnya dengan satuan nominal.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel IV.2 terlihat bahwa nilai maksimum belanja pegawai yaitu 76,18 yang dimiliki oleh Kota Pare pada tahun 2011. Selanjutnya nilai minimum belanja pegawai senilai 46,18 yang terdapat pada Kota Pare pada tahun 2010. Nilai rata-rata

belanja pegawai adalah 59,12, maka hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai sebesar 59,12% dari total belanja daerah. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 terdapat 12 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2011 terdapat 10 kota / yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2012 terdapat 13 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2013 terdapat 10 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa masih banyak kota / kabupaten yang tingkat belanja pegawainya diatas rata- rata. Hal ini menandakan bahwa pemerintah cenderung mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk belanja pegawai.

c. Belanja modal

Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan jumlah Belanja Modal yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran BPK RI. Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2014 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,03 dengan standar deviasi 4,5. Nilai rata-rata sebesar 0,2003 (20,03%) ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah untuk belanja modal sebesar 20,03% dari total belanja daerah. Nilai 8,2 yang merupakan nilai minimum menunjukkan nilai minimal Belanja Modal di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2013. Nilai minimum Belanja Modal terdapat pada Kota Maros pada tahun 2011. Sementara untuk Nilai maksimum yaitu 31,3 menunjukkan nilai

maksimal Belanja Modal di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2013. Nilai tersebut terdapat di kabupaten Barru ditahun 2011.

Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 terdapat 14 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2011 terdapat 14 kota / yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2012 terdapat 13 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2013 terdapat 10 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata. Hal ini menandakan bahwa pemerintah cenderung mengeluarkan biaya yang cukup besar juga untuk belanja pegawai.

d. Pembayaran Utang Daerah

Pembayaran Utang Daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2014 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22,95 dengan standar deviasi 1,65771. Nilai 16,22 yang merupakan nilai minimum menunjukkan nilai minimal pembayaran utang daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2014. Nilai minimum pembayaran utang daerah terdapat pada Kota Luwu Utara pada tahun 2012. Sementara untuk Nilai maksimum yaitu 25,52 menunjukkan nilai maksimal pembayaran utang daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013. Nilai tersebut terdapat di kabupaten Sidenreng Rappang ditahun 2012.

Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 terdapat 14 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas

rata – rata, pada tahun 2011 terdapat 13 kota / yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2012 terdapat 13 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata, pada tahun 2013 terdapat 5 kota / kabupaten yang memiliki nilai belanja pegawai diatas rata – rata. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam 4 tahun terakhir tersebut telah menurunkan jumlah anggaran dalam pembayaran utang daerah.

2. Pengujian Hipotesis

Tabel IV.3
Persamaan Variabel Uji Logit

Variables in the Equation							
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	BP	,039	,053	,530	1	,466	1,040
	BM	,228	,072	9,914	1	,002	1,256
	PUD	,149	,154	,945	1	,331	1,161
	Constant	-9,366	4,727	3,925	1	,048	,000

Sumber: Data diolah peneliti 2016

Berdasarkan Tabel IV.3, maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{FE}{1-FE} = -9,366 + 0,039 \text{ BP} + 0,228 \text{ BM} + 0,149 \text{ PUD}$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel konstan model regresi logistik mempunyai koefisien negative sebesar -9,366 yang berarti jika variabel lain dianggap tetap maka fenomena *flypaper effect* mengalami penurunan sebesar 9,366

2. Belanja pegawai sebesar 0,039, yang berarti bahwa setiap peningkatan pada belanja pegawai maka akan meningkatkan probabilitas terhadap fenomena *flypaper effect* sebesar 0,039
3. Belanja modal sebesar 0,228, yang berarti bahwa setiap peningkatan pada belanja modal maka akan meningkatkan probabilitas terhadap fenomena *flypaper effect* sebesar 0,228. Nilai eksponen belanja modal paling tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai dan pembayaran utang daerah artinya menunjukkan bahwa peluang pengaruh belanja modal paling tinggi terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect* sebesar 0,228.
4. Pembayaran utang daerah sebesar 0,149, yang berarti bahwa setiap peningkatan pada pembayaran utang daerah maka akan meningkatkan probabilitas terhadap fenomena *flypaper effect* sebesar 0,149.

a. Menilai Model fit

Menilai model fit dilakukan untuk mengetahui model yang dihipotesiskan fit dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai $-2LL$ awal dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya. Adanya pengurangan nilai antara $-2LL$ awal dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi semakin baik. Hipotesis untuk menilai model fit adalah (Ghozali 2011:340)

Tabel IV.4**Hasil Uji Model Fit 1 (Block Number=0)**

Iteration History ^{a,b,c}		
Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
1	110,110	,727
Step 0 2	110,086	,762
3	110,086	,762

Sumber: Data diolah peneliti 2016

Tabel IV.4 *block number 0* merupakan tabel yang mencerminkan nilai dari konstanta yang diteliti sebelum dimasukkannya variabel lain pada penelitian. Konstanta pada penelitian ini merupakan *Flypaper Effect*. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik -2LogL sebesar 110,086. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai statistik -2LogL dari *Flypaper Effect* adalah sebesar 110,086.

Tabel IV.5**Hasil Uji Model Fit 2 (Block Number=1)**

Iteration History ^{a,b,c,d}						
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	BP	BM	PUD
Step 1	1	97,171	-6,429	,028	,159	,101
	2	95,836	-8,904	,037	,217	,142
	3	95,805	-9,353	,039	,228	,149
	4	95,805	-9,365	,039	,228	,149
	5	95,805	-9,366	,039	,228	,149

Tabel IV.5 *block number 1* merupakan tabel yang mencerminkan nilai dari konstanta yang diteliti setelah dimasukkannya variabel lain pada penelitian. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik -2LogL sebesar 95,805. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai statistik -2LogL dari hasil *block number 1* adalah sebesar 95,805.

Tabel IV.6
Omnibus Tests Of Model Coefficients

Omnibus Tests of Model Coefficients			
	Chi-square	Df	Sig.
Step	14,281	3	,003
Step 1 Block	14,281	3	,003
Model	14,281	3	,003

Sumber: Data diolah peneliti 2016

Tabel IV.4 dan IV.5 menunjukkan perbandingan nilai -2LL pada *block number=0* dan *block number=1*. Hasil perhitungan nilai -2LL tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai -2LL pada blok pertama (*block number=0*) adalah 110,086 menjadi -2LL pada blok kedua (*block number=1*) sebesar 14,281. Penurunan nilai -2LL pada Tabel IV.6 sebesar 6,804 dapat diinterpretasikan model regresi dalam penelitian adalah model yang baik.

b. Menilai Kelayakan Model Regresi

Menurut Yamin dan Kurniawan (2011:100) untuk Menguji kebaikan model dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit Test. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit Test statistic* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit Test statistic lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel IV.7
Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,215	8	,413

Sumber: Data diolah peneliti 2016

Tabel IV.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,413 didalam pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig yang dihasilkan adalah sebesar $0,413 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang digunakan yang meliputi belanja pegawai, belanja modal dan pembayaran utang pemerintah daerah dinyatakan tepat (fit) dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya flypaper

effect di Sulawesi Selatan. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

c. Uji statistik Wald

Uji Wald merupakan pengujian yang sama dengan uji t, namun pengujian wald digunakan untuk regresi logistik. Uji Wald berfungsi untuk menguji apakah variabel yang dimasukkan dalam model signifikan memberikan kontribusi terhadap model (Yamin, dan Kurniawan, 2011: 106). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 18, hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 8
Hasil Uji Wald

Variables in the Equation							
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	BP	,039	,053	,530	1	,466	1,040
	BM	,228	,072	9,914	1	,002	1,256
	PUD	,149	,154	,945	1	,331	1,161
	Constant	-9,366	4,727	3,925	1	,048	,000

Sumber: Data diolah peneliti 2016

erikut berdasarkan hasil uji wald (tabel IV.8) adalah penjabaran masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Belanja Pegawai tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,466 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis satu (H1) ditolak.

2. Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis dua (H2) diterima.
3. Pembayaran Utang Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,331 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis tiga (H3) ditolak.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkerke's R^2 . Nilai Nagelkerke's R^2 dapat diinterpretasikan sama seperti nilai R^2 pada multiple regression. Nagelkerke adalah penyesuaian terhadap Cox Snell, hanya saja skala yang dihasilkan dipersempit menjadi seluruh nilai antara 0 dan 1 (Yamin dan Kurniawan, 2011:99).

Tabel IV.9
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	95,805 ^a	,150	,210

Sumber: Data diolah peneliti 2016

Berdasarkan informasi tabel IV.9 dapat diketahui bahwa nilai Cox & Snell R Square adalah 0.150 atau 15% dan Nagelkerke R Square sebesar 0,210 atau 21%. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 21% artinya nilai ini membuktikan bahwa variabilitas dependen yaitu fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu belanja pegawai, belanja modal dan pembayaran utang daerah adalah sebesar 21% dan 79% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Seperti yang terlihat dalam sampel penelitian contoh variabel lainnya adalah investasi pemerintah daerah.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap fenomena *Flypaper effect*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diperlihatkan di tabel IV.8, Belanja Pegawai tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,46 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis satu (H1) bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* ditolak (**H₁ ditolak**).

Hasil ini berbandinng terbalik dengan teori belanja daerah mempengaruhi *flypaper effect* dikarenakan belanja pegawai adalah salah satu jenis dari belanja daerah tersebut. Namun kemungkinan dari jenis belanja daerah lainnya yang dapat mempengaruhi *flypaper effect*, seperti belanja modal. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pada objek dan tahun penelitian yang dilakukan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota Sulawesi Selatan tidak dipengaruhi oleh pengeluaran

belanja pegawai. Hal ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, sehingga kondisi pengelolaan keuangan pemerintahan disana juga berbeda dengan objek penelitian sebelumnya.

Belanja pegawai bukan salah satu faktor penyebab terjadinya *flypaper effect*, dikarenakan belanja pegawai ialah belanja daerah yang bersifat rutin dan telah ditetapkan dalam anggaran belanja pemerintah daerah setiap tahunnya, sehingga jumlah yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak mengalami perubahan. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa mengubah porsi jumlah anggaran karena belanja ini sudah ada perhitungan yang jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2010-2013. Hasil ini mendukung penelitian Anita, Puspa dan Herawati (2014) yang menyatakan belanja pegawai tidak mempengaruhi fenomena *flypaper effect*.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap fenomena *Flypaper effect*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis dua (H2) bahwa belanja modal berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* dapat diterima (**H₂ diterima**).

Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2010-2013. Menurut hasil penelitian Holtz-Eakin (1994) yang menyatakan

terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Millas (2002) ditemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat mengurangi penurunan pada pengeluaran belanja modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belanja modal sangat mempengaruhi pada transfer pusat dan besaran pengeluaran transfer tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Belanja modal menjadi salah satu faktor terjadinya *flypaper effect* karena belanja modal merupakan belanja daerah yang sifatnya tidak permanen. Artinya belanja modal yang dianggarkan dalam belanja daerah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan belanja daerah tersebut. Hasil penelitian ini didukung penelitian Fitri (2014) yang menyatakan belanja modal berpengaruh signifikansi positif terhadap fenomena *flypaper effect*.

3. Pengaruh Pembayaran Utang Daerah terhadap fenomena *Flypaper effect*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diperlihatkan di tabel IV.8, Pembayaran Utang Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,33 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis tiga (H3) bahwa pembayaran utang daerah berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* ditolak (**H₃ ditolak**).

Hal ini menggambarkan semakin besarnya jumlah pembayaran utang daerah maka tidak mempengaruhi terjadinya fenomena *flypaper effect*. Pembayaran utang daerah artinya bukan salah satu faktor penting dalam terjadinya fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini terjadi karena adanya indikasi bahwa kecenderungan saat ini pemerintah daerah masih menggantungkan pendapatannya pada Dana Alokasi Umum untuk membiayai mayoritas belanja daerah tersebut.

Berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Semester I Tahun 2013, Perkembangan Pembayaran dari 77 debitur terdapat 45 debitur yang kreditnya macet yang terdiri atas 27 debitur yang sumber dananya berasal dari SLA dan 18 debitur yang sumber dananya dari RPD/RDA/RDI/PRJ disebabkan karena kondisi bisnis dan juga kondisi keuangan perusahaan daerah, namun sudah dimasukkan kedalam program restrukturisasi PMK.120 dan PMK.153 tahun 2013 Kredit macet tersebut sementara dalam proses program restrukturisasi sesuai PMK.120 yaitu penyelesaian piutang negara untuk rekening pinjaman yang bersumber dari SLA,RDI,RPD/RDA yang disalurkan pada PDAM yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan PDAM, memperbaiki manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi dengan cara penjadwalan ulang hutang dengan menghapus tunggakan bunga serta denda sesuai dengan kondisi PDAM tersebut. Program restrukturisasi sesuai PMK.153 yaitu penyelesaian piutang negara untuk rekening pinjaman yang bersumber dari

SLA,RDI,RPD/RDA yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan mengoptimalkan penyelesaian tunggakan, membantu pemerintah daerah menyelesaikan tunggakan atas pinjaman serta membuka kesempatan bagi pemerintah daerah melakukan investasi.

Dari hasil data, Sulawesi Selatan mempunyai nilai pembayaran hutang yang relatif kecil dan sangat menurun pada tahun 2013 yang hanya 5 kota/ kabupaten yang memiliki nilai pembayaran utang daerah diatas rata-rata sehingga hal itupun menjadi salah satu faktor bahwa variabel ini tidak terlalu mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Jumlah pembayaran hutang daerah pada kabupaten Banteang dalam periode 2010-2014 memiliki jumlah yang fluktuatif tiap tahunnya namun tetap terjadi Flypaper Effect. Hasil penelitian ini didukung oleh Burhanuddin (2012) bahwa Pembayaran Utang Daerah tidak mempengaruhi terjadinya Flypaper Effect.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja modal dan pembayaran hutang daerah terhadap fenomena *flypaper effect*

.Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa Belanja Pegawai tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect* pada provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2013. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,07 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis satu (H1) ditolak. Dari hasil ini semakin besar belanja pegawai tidak mempengaruhi fenomena *flypaper effect* karena belanja pegawai ialah belanja daerah yang bersifat rutin dan telah ditetapkan dalam anggaran belanja pemerintah daerah setiap tahunnya, sehingga jumlah yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak mengalami perubahan.
2. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis dua (H2) diterima. Dari hasil ini semakin

besar belanja modal sangat mempengaruhi fenomena *flypaper effect*. Hal itu karena Belanja modal menjadi salah satu faktor terjadinya *flypaper effect* karena belanja modal merupakan belanja daerah yang sifatnya tidak permanen. Artinya belanja modal yang dianggarkan dalam belanja daerah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan belanja daerah tersebut.

3. Pembayaran Utang Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya fenomena *flypaper effect*. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 0,830 yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis tiga (H3) ditolak. Dari hasil Pembayaran Utang Daerah tidak mempengaruhi fenomena *flypaper effect*. Sulawesi Selatan mempunyai nilai pembayaran hutang yang relatif kecil dan tetap sehingga hal itupun menjadi salah satu faktor bahwa variabel ini tidak terlalu mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut.

B. IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Pusat

Fenomena Flypaper Effect dalam penelitian ini mengindikasikan secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti pemerintah pusat memberikan subsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban daerah. Hal ini berdampak kecenderungan pemerintah daerah untuk menanti DAU dari pemerintah pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah yang menjadi sumber PAD. Oleh karena itu, memperlihatkan perilaku tidak biasa dengan tidak

mandirinya suatu pemerintahan daerah. Terdapat kecenderungan untuk melakukan manipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin agar DAU habis digunakan.

Oleh karena itu pemerintah pusat sebaiknya melakukan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan dana DAU dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang perlu diprioritaskan. Sehingga tujuan pemberian DAU menjadikan suatu daerah otonom yang mandiri, yaitu menjadi daerah yang memiliki PAD yang tinggi yang dapat memenuhi Belanja Daerahnya sendiri tanpa harus mengandalkan DAU dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan tepat.

2. Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa fenomena Flypaper Effect menimbulkan kurangnya dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD. Untuk itu, Pemerintah daerah seharusnya lebih berupaya untuk mengurangi peran DAU terhadap Belanja Daerahnya dengan memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan PAD. Sehingga pemerintah daerah sebaiknya melakukan Proses pengalokasian belanja modal perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan sumber pendanaan yang tersedia. Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan riset mendalam tentang akselerasi kemampuan Pendapatan

Asli Daerah dalam membiayai belanja modal agar kemandirian daerah bukan hanya menjadi visi dan misi belaka. Selain itu, sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan guna mencapai efektivitas dan efisiensi alokasi belanja modal.

3. Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengawasi penyelenggaraan dalam penganggaran pembangunan daerah juga perlu ditingkatkan. Karena dana DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah dan PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat juga. Sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki peran serta dalam mengawasi dan menyampaikan aspirasi pada kegiatan pemerintahan untuk mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tepat lagi.

4. Investor

Pemerintah Kota Sulawesi Selatan harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, eksplorasi sumber daya alam yang lebih banyak lagi dan skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor agar mampu menurunkan ketergantungan terhadap dana transferan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum

C. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Pembayaran pokok utang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap flypaper effect. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya untuk menggunakan variabel yang ada dalam belanja daerah, karena pada penelitian ini memberi bukti bahwa pengeluaran pembiayaan pada APBD tidak berpengaruh terhadap fenomena flypaper effect.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dan luas wilayah lebih luas agar dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Rina, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. 2014. Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2007 – 2011). E-Jurnal Universitas Bung Hatta Vol.4 No.1 2014.
- Burhanuddin, Ahmad. (2012) Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah Dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. Accounting Analysis Journal Vol.1 No.1 (2012)
- Endah, Purbarini, Gregorius N. Masdjojo. 2015. Flypaper Effect pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.16 No.1, Juni 2015
- Aprianti. Endah 2015. *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. Universitas Negeri Jakarta
- Fatah dan Irman. 2012. Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Fitri, Diana. 2014. Pengaruh Belanja Pegawai Dan Belanja Modal Terhadap Flypaper Effect (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera 2008-2012). E-Jurnal Universitas Negeri Padang, Vol.2 No.3
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gorodnichenko, Y. 2001. Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine. Master Thesis. University of Kiev.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah, (Studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY”. Yogyakarta.
- Koleman, S Strumpf. 1996. A Predictive Index for the Flypaper Effect Journal of Public Economics Volume 69, Issue 3
- Maimunah, Mutiara. “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera” Simposium Nasional Akuntansi Padang (9). 2006.
- Ndadari, Wulan Laras dan Priyo Hari Adi. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat” The 2nd National Conference UKWMS. 2008.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect pada Pengeluaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, No 1:1-12. 2010.

Qalila. 2013. Pengaruh Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Flypaper Effect. Universitas Kuala Syiah.

Sekretariat Negara. 2006. Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

www.sultengprov.go.id (diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pada jam 19.00 wib)

Yamin dan Kurniawan 2011. SPSS COMPLETE: Teknik Analisis Stastistik Terlengkap. Jakarta : Salemba Infotek

Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Raja Gravindo Persada: Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keseluruhan Penelitian

OBJEK	Tahun	FE	BELANJA PEGAWAI	BELANJA MODAL	PEMBAYARAN UTANG DAERAH
Kabupaten BANTEANG	2010	0	52,5297151	21,7329646	19,3800716
Kabupaten BANTEANG	2011	0	48,3324907	28,66351	22,1032171
Kabupaten BANTEANG	2012	0	57,715183	16,2644632	23,0748211
Kabupaten BANTEANG	2013	1	51,5703512	23,4653553	18,9648996
Kabupaten BARRU	2010	1	58,7932883	26,349614	24,5272933
Kabupaten BARRU	2011	1	55,4892539	31,3415237	23,9759766
Kabupaten BARRU	2012	1	61,7071239	21,227942	23,7129822
Kabupaten BARRU	2013	1	61,6535512	18,7328731	21,416413
Kabupaten JENEPO	2010	1	62,6246196	23,3768578	24,4360575
Kabupaten JENEPO	2011	1	63,8961107	24,0087702	24,5729524
Kabupaten JENEPO	2012	1	69,2495222	17,6101219	24,8726044
Kabupaten JENEPO	2013	1	58,9078601	20,8173121	21,045588
Kabupaten KEP. SELAYAR	2010	1	54,7331408	18,0720549	23,3336226
Kabupaten KEP. SELAYAR	2011	0	53,1125657	17,7141178	23,8999257
Kabupaten KEP. SELAYAR	2012	1	55,4207756	17,825087	22,0935106
Kabupaten KEP. SELAYAR	2013	0	49,7003658	26,2186629	21,6395566
Kabupaten LUWU	2010	0	56,2426681	20,4025461	21,0326174
Kabupaten LUWU	2011	0	49,9389214	23,9848497	21,6996504
Kabupaten LUWU	2012	1	61,6957402	17,4164477	22,3921773
Kabupaten LUWU	2013	1	55,5941944	19,9039302	20,9901462
Kabupaten LUWU UTARA	2010	1	51,6123746	15,3819929	23,7771719
Kabupaten LUWU UTARA	2011	1	48,5411844	23,1415552	23,8193857
Kabupaten LUWU UTARA	2012	0	52,1477023	18,6703429	16,2269501
Kabupaten LUWU UTARA	2013	0	52,3966879	19,0955696	19,4752384
Kapupaten SINJAI	2010	1	61,6311746	24,6568409	23,7316732
Kapupaten SINJAI	2011	1	58,3560413	22,909659	24,2938254
Kapupaten SINJAI	2012	0	63,5434839	16,2566422	23,0049776

Kapupaten SINJAI	2013	1	60,1689414	17,3073542	21,4652032
Kabupaten SOPPENG	2010	1	65,1663999	15,3174138	21,0258174
Kabupaten SOPPENG	2011	1	60,7126609	18,545368	22,0227633
Kabupaten SOPPENG	2012	0	69,2566052	13,1508744	22,9693261
Kabupaten SOPPENG	2013	0	65,2185981	17,0668942	22,9779408
Kota MAKASSAR	2010	1	59,3313125	12,8249391	23,0005044
Kota MAKASSAR	2011	1	62,625792	9,8443793	21,382725
Kota MAKASSAR	2012	0	54,8234569	16,2006104	24,4880796
Kota MAKASSAR	2013	1	51,9565876	15,8224281	23,4477748
kabupaten TAKALAR	2010	1	61,3374559	21,8654171	22,7002777
kabupaten TAKALAR	2011	1	57,0547802	20,325285	22,3218569
kabupaten TAKALAR	2012	1	58,3738033	15,6497338	24,1503471
kabupaten TAKALAR	2013	0	59,7948116	15,0901753	21,6109515
KOTA PARE PARE	2010	1	46,1834177	28,1209093	21,2857386
KOTA PARE PARE	2011	1	76,1873383	23,7749773	21,8084483
KOTA PARE PARE	2012	0	57,2298263	15,2190312	24,7971692
KOTA PARE PARE	2013	1	56,0597325	16,9347577	24,0932238
Kabupaten BONE	2010	0	71,3201617	11,8570775	23,992182
Kabupaten BONE	2011	0	67,9566314	13,4206755	23,4212315
Kabupaten BONE	2012	1	65,4330547	17,4715113	24,1818879
Kabupaten BONE	2013	1	60,0352815	17,5432887	22,1015692
Kabupaten BALUKUMBA	2010	1	62,9480377	17,2187258	20,9027639
Kabupaten BALUKUMBA	2011	1	66,1862298	19,5740988	23,3179538
Kabupaten BALUKUMBA	2012	0	67,8822031	13,6977051	22,9004906
Kabupaten BALUKUMBA	2013	0	60,4472465	16,6604349	20,7232658
Kabupaten ENREKANG	2010	1	59,1238021	22,6238704	21,7441484
Kabupaten ENREKANG	2011	1	59,7888198	20,1770233	24,2313448
Kabupaten ENREKANG	2012	1	60,4770874	18,0635826	24,2500658
Kabupaten ENREKANG	2013	1	61,1974935	18,0465229	23,949722
KABUPATEN GOWA	2010	1	58,0475674	24,8780608	22,2235086
KABUPATEN GOWA	2011	1	63,3805886	17,8248187	23,2765451

KABUPATEN GOWA	2012	1	66,7152636	17,4772439	24,5577479
KABUPATEN GOWA	2013	1	50,7474262	20,6381041	22,9659053
KABUPATEN MAROS	2010	1	66,6734324	28,2380942	24,9028038
KABUPATEN MAROS	2011	0	59,1982878	8,2209249	25,3544243
KABUPATEN MAROS	2012	0	64,3990541	19,9658786	24,6799061
KABUPATEN MAROS	2013	1	54,3463562	30,3459931	23,8232782
KABUPATEN PANGKEP	2010	1	60,1161622	22,4118486	23,9965548
KABUPATEN PANGKEP	2011	1	61,1897405	23,6593647	23,5867088
KABUPATEN PANGKEP	2012	0	62,5625769	21,4284434	23,8940102
KABUPATEN PANGKEP	2013	1	58,7328265	24,1445775	18,041828
KABUPATEN PINRANG	2010	1	58,7539557	22,9550652	24,2473226
KABUPATEN PINRANG	2011	1	54,4950384	26,1257863	23,9917378
KABUPATEN PINRANG	2012	1	61,0949826	20,4375176	22,8108406
KABUPATEN PINRANG	2013	1	59,1368169	17,3271096	22,5965014
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2010	1	59,1122091	22,6815055	25,1704077
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2011	1	58,5679805	21,7588339	25,3265068
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2012	0	67,1627809	14,1426961	25,5255076
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2013	0	60,4594297	17,3959206	22,5361778
KABUPATEN TANAH TORAJA	2010	0	66,0559628	16,9573229	24,4803907
KABUPATEN TANAH TORAJA	2011	1	52,0180711	29,5968669	23,4279006
KABUPATEN TANAH TORAJA	2012	1	56,6759383	25,8058624	22,88829
KABUPATEN TANAH TORAJA	2013	0	61,8095567	19,9127435	23,0589571
KABUPATEN TANAH WAJO	2010	1	55,7728384	23,3345142	24,7591083
KABUPATEN TANAH WAJO	2011	1	51,275535	27,1619254	24,7451645
KABUPATEN TANAH WAJO	2012	1	56,1717758	25,4481033	23,5054408
KABUPATEN TANAH WAJO	2013	1	56,0716699	18,9801567	22,0632545
KABUPATEN TANAH PALOPO	2010	1	58,3494963	21,2606338	23,4096348
KABUPATEN TANAH PALOPO	2011	1	56,1265302	23,0978129	23,1482524
KABUPATEN TANAH PALOPO	2012	0	57,9955513	18,6157844	23,1841723
KABUPATEN TANAH PALOPO	2013	0	57,8456639	16,0136488	23,487614

Lampiran 2 Data Penelitian *Flypaper Effect*

OBJEK	Tahun	KOEF PAD	KOEF DAU	FLYPAPER EFFECT
Kabupaten BANTEANG	2010	12,083	1,768	0
Kabupaten BANTEANG	2011	7,383	1,023	0
Kabupaten BANTEANG	2012	14,223	-,893	0
Kabupaten BANTEANG	2013	-88,320	5,575	1
Kabupaten BARRU	2010	-64,180	-6,477	1
Kabupaten BARRU	2011	-11,108	127,708	1
Kabupaten BARRU	2012	-120,538	17,753	1
Kabupaten BARRU	2013	-,948	6,834	1
Kabupaten JENEPO	2010	-87,098	21,653	1
Kabupaten JENEPO	2011	3,075	10,582	1
Kabupaten JENEPO	2012	-47,000	1,368	1
Kabupaten JENEPO	2013	-614,738	20,989	1
Kabupaten KEP. SELAYAR	2010	44,036	10,912	1
Kabupaten KEP. SELAYAR	2011	14,905	-,043	0
Kabupaten KEP. SELAYAR	2012	,083	13,673	1
Kabupaten KEP. SELAYAR	2013	25,534	-,270	0
Kabupaten LUWU	2010	-16,811	1,838	0
Kabupaten LUWU	2011	28,857	4,108	0
Kabupaten LUWU	2012	-39,737	4,993	1
Kabupaten LUWU	2013	-33,525	4,123	1
Kabupaten LUWU UTARA	2010	-,007	1,293	1
Kabupaten LUWU UTARA	2011	-13,991	6,610	1
Kabupaten LUWU UTARA	2012	18,461	-,269	0
Kabupaten LUWU UTARA	2013	-3,879	,540	0
Kapupaten SINJAI	2010	-2,938	7,399	1
Kapupaten SINJAI	2011	-8,025	1,993	1
Kapupaten SINJAI	2012	1,638	,722	0
Kapupaten SINJAI	2013	-42,933	2,993	1
Kabupaten SOPPENG	2010	-21,844	2,173	1
Kabupaten SOPPENG	2011	10,489	,960	1
Kabupaten SOPPENG	2012	27,990	-1,442	0
Kabupaten SOPPENG	2013	18,694	-1,139	0
Kota MAKASSAR	2010	4,159	8,912	1
Kota MAKASSAR	2011	-1,855	3,331	1
Kota MAKASSAR	2012	1,828	1,011	0
Kota MAKASSAR	2013	,423	1,828	1
kabupaten TAKALAR	2010	,156	5,838	1

kabupaten TAKALAR	2011	,086	3,468	1
kabupaten TAKALAR	2012	-13,882	4,605	1
kabupaten TAKALAR	2013	4,693	,117	0
KOTA PARE PARE	2010	,631	8,706	1
KOTA PARE PARE	2011	2,289	2,716	1
KOTA PARE PARE	2012	8,911	-1,003	0
KOTA PARE PARE	2013	-,945	7,019	1
Kabupaten BONE	2010	-4,999	-8,115	0
Kabupaten BONE	2011	3,017	20,034	0
Kabupaten BONE	2012	-13,811	2,837	1
Kabupaten BONE	2013	,214	5,481	1
Kabupaten BALUKUMBA	2010	-,802	,051	1
Kabupaten BALUKUMBA	2011	-,999	2,846	1
Kabupaten BALUKUMBA	2012	32,343	-,807	0
Kabupaten BALUKUMBA	2013	12,708	-,162	0
Kabupaten ENREKANG	2010	2,306	7,128	1
Kabupaten ENREKANG	2011	1,908	7,018	1
Kabupaten ENREKANG	2012	-17,948	1,092	1
Kabupaten ENREKANG	2013	-6,641	124,552	1
KABUPATEN GOWA	2010	-,917	15,720	1
KABUPATEN GOWA	2011	,824	1,981	1
KABUPATEN GOWA	2012	,455	2,042	1
KABUPATEN GOWA	2013	,745	9,474	1
KABUPATEN MAROS	2010	,274	41,906	1
KABUPATEN MAROS	2011	6,805	-,730	0
KABUPATEN MAROS	2012	6,564	-,080	0
KABUPATEN MAROS	2013	-1,525	17,095	1
KABUPATEN PANGKEP	2010	-0,313	0,257	1
KABUPATEN PANGKEP	2011	,786	3,140	1
KABUPATEN PANGKEP	2012	3,185	,722	0
KABUPATEN PANGKEP	2013	,941	1,371	1
KABUPATEN PINRANG	2010	2,537	4,963	1
KABUPATEN PINRANG	2011	1,956	3,072	1
KABUPATEN PINRANG	2012	-,937	31,175	1
KABUPATEN PINRANG	2013	,021	4,506	1
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2010	-5,244	12,941	1
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2011	-22,743	122,399	1
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2012	10,781	-,219	0
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	2013	76,727	,430	0
KABUPATEN TANAH TORAJA	2010	91,457	-,480	0
KABUPATEN TANAH TORAJA	2011	-2517,582	-38,064	1

KABUPATEN TANAH TORAJA	2012	-16,643	4,104	1
KABUPATEN TANAH TORAJA	2013	6,638	-,853	0
KABUPATEN TANAH WAJO	2010	6,241	37,199	1
KABUPATEN TANAH WAJO	2011	,533	11,314	1
KABUPATEN TANAH WAJO	2012	-31,811	7,480	1
KABUPATEN TANAH WAJO	2013	-6,116	2,109	1
KABUPATEN TANAH PALOPO	2010	-4,520	1,003	1
KABUPATEN TANAH PALOPO	2011	-5,284	27,767	1
KABUPATEN TANAH PALOPO	2012	13,279	,324	0
KABUPATEN TANAH PALOPO	2013	2,340	,412	0



Ines Priliatami, lahir di Bekasi, 16 April 1994. Anak pertama dari Empat bersaudara. Merupakan anak perempuan dari pasangan Johan Samsir Alamsyah dan Siti Rahayu. Mempunyai satu satu adik perempuan dan dua adik laki- laki. Bertempat tinggal di Jalan Sawo 4 No.22 RT 08/ 015 Kp.2 Cikunir,Bekasi Barat.

Menempuh pendidikan formal pada SDN JAKASAMPURNA 3 BEKASI dengan lulus pada tahun 2006, kemudian SMPN 12 BEKASI dimana lulus pada tahun 2009, dilanjutkan dengan SMAN 8 BEKASI lulus pada tahun 2012, dan Universitas Negeri Jakarta selama tahun 2012 – 2017.

Penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai anggota Dana Usaha pada tahun 2013 – 2014.